

ULAMA DAN POLITIK DI INDONESIA PASCA REFORMASI

Oleh
Safradji¹

Abstract

Ulama and politics are sometimes inseparable. History proves their involvement in the struggle for independence. When the election was approaching, the clerics were back in the spotlight and were even won over by each of the ORSOSPOLs that were going to contest the election. They mutually endeavor to drag these informal and charismatic figures into practical politics. So the names of ulama, kiayi, ajengan and muballigh are scattered in the legislative candidates of each ORSOSPOL. as a political institution that is responsible for providing political education to cadres of political parties and to the wider community. A political system with a democratic political party is the choice as a tool to realize the ideals of the nation and state. Political education is an effort to create a healthy and quality Indonesian democracy. In addition, it results in low quality levels of political party cadres in encouraging the improvement of people's lives. The implications of the role of political parties in the political education of the younger generation on regional political resilience have an impact on the low level of community political participation and the low level of community participation in the making and supervision of public policies
Keynote: Ulamak. Political

ABSTRAK

Partai politik merupakan elemen penting dalam negara demokrasi. Salah satu fungsi dari dibentuknya partai politik Sejak runtuhnya rezim Orde baru (ORBA) dibawah kepemimpinan H. M. Soeharto dan bergulirnya era reformasi sebuah gerakan yang menuntut era reformasi disegala bidang baik reformasi politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya bermunculan partai politik. Ulama dan politik kadang tak bisa dipisahkan. Sejarah membuktikan keterlibatan mereka dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Saat pemilu sudah diambang pintu, ulama kembali menjadi sorotan bahkan direbutkan masing-masing ORSOSPOL yang akan bertarung dalam pemilu. Mereka saling berupaya untuk menyeret tokoh informal dan kharismatik ini kedalam kanca politik praktis. Maka bertaburkanlah sejumlah nama ulama, kiayi, ajengan sampai muballigh dalam calon legislative setiap ORSOSPOL. sebagai institusi politik yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik kepada kader partai politik maupun kepada masyarakat luas. Sistem politik yang demokrasi partai politik menjadi pilihan sebagaialat untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Pendidikan

¹ Dosen STITA Sumenep

politik merupakan usaha untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Selain itu, berakibat rendahnya tingkat kualitas kader partai politik dalam mendorong perbaikan kehidupan masyarakat. Implikasi peran partai politik dalam pendidikan politik generasi muda terhadap ketahanan politik wilayah berdampak pada rendahnya partisipasi politik masyarakat dan rendahnya tingkat peran serta masyarakat dalam pembuatan serta pengawasan kebijakan publik

Kata kunci : Ulama, Politik

Pendahuluan

Menurut Quraish Shihab, bahwa kata ulama/kiayi disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak dua kali. *Pertama*, dalam konteks ajaran al-Qur'an untuk memperhatikan turunnya hujari dari langit, beraneka ragamnya buah-buahan, gunung, binatang dan manusia yang kemudian diakhiri dengan ayat yang artinya: *Sesungguhnya yang takut kepada Allah, diantara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.*² Ayat ini menggambarkan bahwa yang dinamakan ulama/kiayi adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah SWT. yang bersifat *kauniyah* (fenomena alam). *Kedua*, dalam konteks pembicaraan al-Qur'an yang kebenaran dan kandungannya telah diakui (diketahui) oleh ulama Bani Israil, seperti yang tersebut dalam surah as-Syu'ara ayat 197 yang artinya: *Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya.*³

Berdasarkan kedua ayat di atas, maka dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ulama/kiayi adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat *kauniyah* maupun *qur'aniyah*, yaitu orang yang mampu memadukan dua potensi yakni potensi pikir (terhadap ayat Allah yang bersifat *kauniyah*) dan dzikir (terhadap ayat Allah yang bersifat *qur'aniyah*) dalam terminology al-Qur'an disebut *Ulul Albab.*⁴

²Al-Qur'an Surah al-Fathir ayat 28

³Al-Qur'an Surah as-Syu'ara ayat 197

⁴Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996

Selanjutnya jika diperhatikan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang ilmu dalam berbagai bentuk kata yang semuanya berjumlah 854, dan kata-kata lain yang sejalan dengan arti kata ilmu tersebut, maka akan kita temukan, bahwa al-Qur'an mengkaitkan ilmu yang terpuji dengan sikap *istislam* (menyerah/tunduk) dan *khasyyah* (takut) kepada Allah.

Hukum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah ada yang sudah rinci (*tafshily*), adapula yang masih global (*ijmaly*). Hukum yang rinci, seperti mengenai ibadah *mahdloh*, hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Sedangkan hukum mengenai kemasyarakatan umpama masalah politik, teknisnya lebih banyak diserahkan kepada ijtihad manusia. Al-Qur'an dan Hadits hanya memberikan prinsip-prinsipnya saja.

Dengan melihat esensi di atas, maka apabila ulama/kiayi, para pemimpin Islam, ikut memperhatikan masalah politik, tidak dapat dikatakan bahwa mereka sudah keluar dari apa yang sudah menjadi tugasnya, justru kepedulian mereka terhadap politik adalah sebagai pengejawantahan dari tugas *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan tugas utama para ulama/kiayi.

Menurut Ibrahim Husen, sebagaimana dikutip oleh Juhaya S. Praja, mengatakan bahwa agama Islam tidak dapat dipisahkan dari masalah politik, tidak dapat dipisahkan hanya dapat dibedakan. Selain itu menurut Efendi, mengatakan ulama/kiayi sangat sah bicara politik, dan menurut Malik Fajar mengatakan "tidak perlu mempermasalahkan seruan ulama/kiayi terhadap

politik, karena masih terkait dengan keagamaan, sebab tidak mungkin menyingkirkan agama dari proses bernegara”.

Mengingat agama tidak hanya mengatur kehidupan individual pemeluknya, tetapi juga berhubungan erat umat dengan lingkungan sosialnya, termasuk negaranya. Jadi kehadiran ulama/kiayi tidak mungkin lepas atau bebas dari dinamika masyarakat Indonesia, termasuk dinamika politik di dalamnya. Apabila wilayah politik lepas dari kepedulian ulama/kiayi atau tidak menyertakan seruan atau fatwa ulama di dalamnya, maka politik nasional akan bebas nilai, dan ini bertentangan dengan filosofis, yuridis dan sosiologis bangsa Indonesia.

Namun ketika banyak bermunculan para ulama/kiayi yang berperan aktif dalam mimbar politik, semakin banyak pula masalah ditengah-tengah sosial kemasyarakatan dan kontradiksi inilah yang menarik penulis untuk meneliti yang dalam konteks ini penulis mengambil tema “*Ulama dan Politik Di Indonesia Pasca Reformasi*”.

Pembahasan

Pergulatan Partai Politik dan Munculnya Multi Partai Pasca Reformasi

Runtuhnya Orde Baru—sekali lagi—membangkitkan harapan lama akan terciptanya tatanan demokratis Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1998 setelah Soeharto membacakan pidato pemunduran diri di Istana Merdeka, para mahasiswa dan elit pro reformasi menyambutnya dengan gembira dan sukacita. *Selamat Datang Pemerintahan Baru*, begitulah judul berita utama Kompas pada hari itu untuk menggambarkan sikap mereka tentang kejatuhan Soeharto. Soeharto dan tatanan Orde Baru telah jatuh, kini Indonesia memasuki babak baru, transisi demokrasi yang umum disebut era reformasi.

Kata “reformasi” berasal dari *to reform* yang secara harfiah berarti membentuk kembali. Dalam hal ini reformasi berarti membentuk kembali tatanan sosial politik lama yang telah runtuh dengan kejatuhan Orde Baru ke arah tatanan yang lebih demokratis. Tapi mewujudkan demokrasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kejatuhan Soeharto tidak bisa dianggap sebagai penciptaan demokrasi secara otomatis. Demokrasi memiliki musuh-musuhnya sendiri. Apalagi para elit penopang kekuasaan Soeharto terbukti mampu mengkonsolidasikan dirinya di era reformasi.

Bahkan upaya pembekuan Partai Golkar juga dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid melalui Maklumat Presiden pada tanggal 23 Juli 2001,

namun kemudian gagal karena Mahkamah Agung menganggap maklumat Presiden atau Dekrit tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁵

Ditengah-tengah tekanan politik yang keras tersebut, Golkar ternyata berhasil lolos sebagai peserta Pemilu 1999, dan mampu meraih dukungan terbesar kedua. Dengan demikian Partai Golkar mampu *survive* dalam era transisi yang keras dan penuh dengan tantangan.

Seperti yang kita ketahui GUSDUR dan Mathori Abdul Jalil adalah pemimpin NU berasal dari PKB dan Amien Rais berasal dari PAN pernah menjadi ketua umum Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah adalah Ormas Islam terbesar di Indonesia. Namun sejak awal pembentukan PKB dan PAN mencanangkan bahwa mereka bukan Partai Islam dan pemimpin mereka dengan sadar memilih Pancasila bukan Islam sebagai ideologi. Dan pilihan tersebut bukan tidak memiliki dampak yang segera terlihat, beberapa ulama/kiayi kemudian meninggalkan PKB dan membentuk Partai sendiri seperti PNU (Partai Nahdlatul Ulama), PKU (Partai Kesatuan Ummat), dan Partai SUNI (Solidaritas Uni Nasional Indonesia). Jadi bukan kebetulan jika PKB, PNU dan PKU memiliki lambang yang mirip, yakni bola dunia dengan Sembilan bintang—elemen-elemen-dasar lambag NU.

Pemilu merupakan satu-satunya alat rekrutment dan seleksi orang yang akan tampil dalam proses politik negara. Maka paling sedikit 181 Partai Politik didirikan walaupun hanya 48 yang memenuhi syarat menjadi

⁵Keluarnya Surat Mahkamah Agung itu menanggapi surat dari Ketua DPR RI yang juga ketua umum Partai Golkar Akbar Tandjung, yang menolak Dekrit Presiden tersebut dan meminta Mahkamah Agung untuk mengeluarkan fatwa.

peserta Pemilu pada Juni 1999.⁶ Dari 48 partai itu terdapat partai warisan Orde Baru yang berubah wajah seperti Golkar, Inkarnasi Partai era demokrasi liberal seperti PBB dan partai baru seperti PK. Kekuasaan Orba selama 32 tahun ternyata tidak mampu membunuh berbagai ideologi kontra Orba. Terbukti berbagai ideologi yang pada masa Orba ditekan kembali tampil pada masa reformasi walau dalam suasana gagap dan tidak teratur. Umumnya, mereka menjadikan reformasi sebagai aksi balas dendam. Karena itu, kemunculannya lebih merupakan ekspresi emosional daripada dilatari oleh visi dan *platform*. Dalam suasana kemunculan seperti ini kelembagaan partai politik seringkali sangat bergantung kepada horisme dan popularitas figur atau tokoh utama. Maka, wajar bila mayoritas partai politik lebih berupa partai personalistik daripada partai demokratik. Partai tidak memiliki aturan dan disiplin tegas dan kendali ada di tangan tokoh atau figur partai. PDIP dan PKB adalah contoh sederhana dari partai personalistik. Tentu saja fenomena partai personalistik ini menjadi kendala tersendiri dalam upaya konsolidasi demokrasi.

Disamping fenomena partai personalistik, era reformasi juga ditandai oleh kemunculan kembali Islam politik dalam bentuknya yang beragam. Diantara mereka ada yang memang berasaskan Islam dan ada pula yang Pancasila tapi basis konstituennya adalah komunitas Islam seperti PKB dan PAN. Namun kemunculan Islam politik ini dihadapkan pada fakta bahwa komunitas Islam telah mengalami transformasi kultural dan mobilitas sosial

⁶Perkiraan jumlah partai politik bervariasi, dari 177 sampai 200. Angka 181 berasal dari Unit Riset surat kabar Kompas dikutip dari Johnson, *Partai Politik dan Konsolidasi*.....Hal. 118.

selama dua dasawarsa terakhir Orde Baru.⁷ Maka dibutuhkan cara-cara baru dalam artikulasi jika partai-partai Islam ini tetap ingin eksis dalam pergumulan demokrasi mereka tidak bisa hanya memanfaatkan kekuatan simbol-simbol politik lama. Disamping itu partai-partai Islam ini dilanda perpecahan dan susahnyanya membangun persatuan serta terjebak pada isu-isu dangkal seperti pemimpin perempuan dan caleg-caleg Non Muslim. Berbagai usaha persatuan itu akhirnya berujung pada pembentukan poros tengah di Parlemen yang dipelopori oleh Yusril Ihza Mahendra dan Amien Rais dan berhasil menjadi Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Sangat disayangkan kemesraan persatuan Islam politik ini hanya sebentar karena tidak lama kemudian mereka kembali pecah dalam persetujuan antar Abdurrahman Wahid dengan Parlemen.

Pemilu 1999 berhasil dilaksanakan dan menampilkan enam partai yang akan memegang peran kunci dalam proses-proses konsolidasi demokrasi. Enam partai itu adalah: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jumlah prolehan suara 33,7 % dan perolehan kursi di DPR 153, Partai Golkar dengan perolehan suara 22,4 % dan perolehan kursi 120, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan suara 12,6 % dan jumlah perolehan kursi 51, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan suara 10,7 % dan jumlah kursi 58, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan suara 7,1 % dan jumlah kursi 34, Partai Bulan Bintang (PBB) dengan perolehan suara 1,9 % dan jumlah kursi 13. Atas berbagai

⁷Bahtiar Efendi, *Fenomena Partai Islam*, dalam Hamid Basyait dan Hamid Abidin, ed., *Mengapa Partai Islam Kalah: Perjalanan Politik Islam dari Pra Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*, (Jakarta: Alfabeta, 1999), Hal. 35.

kualisi dan transaksi politik yang dibangun Abdurrahman Wahid sebagai tokoh PKB terpilih sebagai Presiden, Megawati Soekarno Putri sebagai tokoh PDIP terpilih sebagai Wakil Presiden, Amien Rais sebagai tokoh PAN terpilih sebagai Ketua MPR, Akbar Tandjung sebagai tokoh Golkar terpilih sebagai Ketua DPR, dan Hamzah Haz sebagai tokoh PPP serta Yusril Ihza Mahendra sebagai tokoh PBB masuk ke dalam posisi penting dalam Kabinet Persatuan-nya Abdurrahman Wahid. Terlepas dari praktik politik transaksional dan bagi-bagi koe kekuasaan diantara partai-partai besar dan menengah, Parlemen dan Eksekutif hasil pemilu 1999 yaitu adalah penentu arah transisi demokrasi. Ironis, karena pemegang kendali transisi ini kemudian terjebak dalam konflik dangkal antar Presiden dan Parlemen yang berujung dengan terpentalnya Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Masa singkat Abdurrahman Wahid cukup memberi gambaran bagaimana para elit telah gagal membangun demokrasi yang berkualitas. Periode ini ditandai oleh kegaduhan politik pertarungan aksi massa, kisruh sosial, dan praktik politik dagang sapi yang begitu kentara. Dalam suasana sosial politik seperti ini tidak mungkin berbagai institusi dan instrumen demokrasi bisa diwujudkan secara utuh.⁸

⁸*Ibid.*

Pendidikan Politik oleh Parpol: Sebuah Ikhtiar Perbaikan Kualitas Demokrasi

Tidaklah salah untuk mempertanyakan bagaimana kualitas demokrasi pasca reformasi yang telah terjadi di Indonesia. Disaat beberapa Negara bergulat menuntut dibukanya keran kebebasan di Negara tersebut, lebih dari 10 tahun sudah keran kebebasan dibuka di Indonesia seiring dengan berjalannya reformasi. Salah satu indikator kebebasan tersebut adalah terselenggaranya pemilihan umum yang diikuti 48 parpol jumlah yang meloncat lebih dari drastis pasca pemilu zaman orde baru yang hanya diikuti 3 partai. Akan tetapi keran kebebasan yang dibuka terlalu lebar itu mulai dievaluasi efektifitasnya, terutama bila disandingkan dengan hasil-hasil pemilu dan juga pemilihan umum kepala daerah yang telah berlangsung.

Bentuk-bentuk penyelewengan masih erat terjadi, misalnya serangan fajar dan politik uang yang santer mewarnai setiap Pemilu atau Pilukada. Dari segi hasil, untuk pemilu misalnya calon-calon yang terpilih menjadi anggota legislatif lebih karena faktor popularitas seperti pada selebriti yang kemudian beralih profesi menjadi anggota dewan. Dalam ranah pilukada ditemukan dikemudian hari bahwa kandidat yang terpilih melakukan tindak pidana korupsi, ataupun melakukan tindakan-tindakan yang melanggar susila, bahkan terjadi pula pilkada di beberapa daerah yang lebih mirip dengan suksesi dinasti keluarga.

Realita pada pemilu dan pilukada di atas bisa jadi merupakan akibat dari minimnya pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol

masyarakat. Pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan partai-partai hanya menyiapkan orang-orang yang dirasikan mampu meningkatkan jumlah pemilih dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan. Tidak heran kemudian lebih banyak orang yang terkenal ataupun memiliki modal besar yang lebih banyak dimajukan partai. Partai politik lebih banyak melakukan “pencitraan” dibandingkan pendidikan politik. Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, menyalurkan aspirasi, dan pendapat politik yang memungkinkan untuk membangun negara. Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik.

Dimana partisipasi politik ini mencakup semua kegiatan sukarela, melalui turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Menjadi anggota dalam golongan politik seperti partai, kelompok penekan (pressure group), kelompok kepentingan (interest group) maupun duduk dalam lembaga politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Termasuk mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan-badan itu, ikut berkampanye, atau menghadiri kelompok diskusi dan sebagainya.

Di Indonesia peran Partai Politik adalah merupakan pilar penyangga demokrasi. Dalam artian bahwa, keberadaan demokrasi tanpa adanya Partai Politik adalah sebuah situasi kekuasaan tanpa legitimasi. Sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi, kehadiran partai politik dalam Negara demokrasi tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsinya. Tidak hanya kepada konstituen yang dikelola, tetapi juga kepada bangsa dan negara.

Baik buruknya sebuah partai politik akan berdampak juga pada baik buruknya sebuah bangsa. Hal ini karena jabatan-jabatan dalam sebuah Negara, nantinya akan diisi oleh orang-orang dari partai politik yang ada melalui pemilu. Dengan partai politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus, guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional,” jelas Agam.

Dalam rangka pelaksanaan sistem Negara yang demokratis, untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan partai politik yang bisa menjadi sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. arpol merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan serta mengaktualisasikan haknya dalam mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat sebagai hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat

Fungsi Parpol sebagaimana disebut dalam pasal 11 ayat 1 UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, antara lain sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat.

Banyak parpol di Indonesia membawa konsekuensi, bahwa seharusnya masyarakat pemilih mempunyai wawasan yang lebih luas

tentang hal yang terkait dengan kebebasan berdemokrasi. Namun demikian, sampai saat ini peran parpol dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat masih belum maksimal.

Demam Panggung Politik Ulama

Ulama yang dimaksud dalam tulisan ini adalah ulama/kiayi pengasuh pondok pesantren yang menjaga nilai agama sebagaimana halnya masyarakat memberikan sebutan itu pada ulama.

Berpolitik memang menjadi hak setiap warga negara, tidak terkecuali ulama/kiayi. Sebab Rasulullah SAW sendiri adalah sosok figur yang lengkap. Beliau adalah Rasul, kepala rumah tangga, ulama, negarawan bahkan politikus. Namun dalam hal politik beliau senantiasa mengedepankan aspek etika dalam berpolitik. Hal ini terbukti bahwa beliau tidak pernah menghujat, mencaci, mencela, juga tidak pernah mengadakan konspirasi untuk menjungkal lawan-lawan politiknya. Akan tetapi beliau lebih suka melakukan *ishlah* (rekonsiliasi), seperti yang terjadi dalam kasus Perjanjian Hudaibiyah. Oleh karena itu jika kebetulan seorang ulama/kiayi terjun di dunia politik maka contohlah Rasulullah SAW. *“Hindarilah saling menghujat, saling berburuk sangka, sudah saatnya bangsa kita yang terpuruk ini bangkit, bersatu padu untuk memulihkan puing-puing kehancuran akibat permusuhan yang seakan tiada henti”*⁹

Terjadi suksesi-suksesi dikalangan ulama (baca: kiyai) yang sebenarnya merupakan jawaban dari beberapa masalah yang dihadapi oleh

⁹Imam Mawardi, *Wahai Ulama Kembalilah Kepada Umat*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.

ulama/kiayi itu sendiri. Apa, bagaimana dan kemana arah perjalanan hidup ulama pada dewasa ini dalam upaya mereposisi peran ulama dalam proses pembangunan umat dan bangsa, kini dan masa yang akan datang.

Terlepas dari hingar bingarnya politik pada masa ini, ternyata ada sesuatu yang menarik, yakni tampilnya beberapa ulama (baca; kiyai) di atas pentas politik nasional. Mengapa? Lantaran selama ini masyarakat sudah terlanjur mengetahui bahwa ulama/kiayi adalah mereka yang mempunyai kapabilitas intelektual dibidang agama Islam dan hanya mengkonsentrasikan diri dalam kancan perbaikan umat, baik dalam aspek intelektual, kepribadian, maupun moralitas. Tetapi mengapa tiba-tiba "*kaum bersarung dan berterumpah*" itu tampil di dunia politik yang penuh dengan *vasted interest*, sekaligus mempunyai *image* bahwa politik itu identik dengan kekuasaan? Apakah mereka sudah merasa letih untuk mengurus santri dan umat dan menggantikannya dengan dunia baru yang bernama politik? Atau apakah mereka mempunyai keinginan untuk membaluri dunia politik dengan akhlakul karimah, atau politik yang beretika, karena selama ini politik hanya merupakan strategi untuk saling menjungkalkan antara satu dengan yang lainnya, sekaligus merupakan ajang caci maki?.

Tidak ayal lagi, bahwa tampilnya para ulama/kiayi dalam pentas politik nasional menjadi bahan perdebatan yang hangat. Apalagi setelah lengsernya Gus Dur pada saat itu perilaku politik para ulama/kiayi semakin muncul kepermukaan. Hal ini terbukti banyaknya para ulama/kiayi yang tampil di atas mimbar politik.

Pertanyaannya, apakah ulama/kiayi salah? Tentu saja tidak. Ulama dan politik kadang tidak bisa dipisahkan. Sejarah telah membuktikan keterlibatan mereka dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Mereka tetap memainkan peran penting dalam politik.¹⁰ Dan hak setiap orang untuk menentukan aktivitas politiknya sendiri, termasuk ulama/kiayi. Namun jika hal itu ditinjau dari dalam perspektif demokrasi. Lain halnya dengan pihak-pihak yang mengkhawatirkannya. Orang menjadi khawatir, jika para ulama/kiayi masuk ke dalam wilayah politik, mereka tidak dapat lagi menjadi payung umat, tidak dapat lagi memberikan kesejukan ketika umat dalam kekalutan batin, atau bahkan mereka tidak dapat lagi independen dan objektif. Sebab politik adalah wilayah abu-abu alias *grey area*. Inilah yang banyak menjadi kekhawatiran banyak kalangan.

Fenomena perpecahan parpol yang berbasis Islam (yang di dalamnya banyak ulama/kiayi), akibat perbedaan politik di antara ulama/kiayi, sungguh merupakan pukulan tersendiri bagi umat. Umat dibuat bingung, mana ulama/kiayi yang harus dijadikan panutan secara politis. Bahkan banyak yang apatis, untuk tidak mendukung siapapun dalam politik, alias golput, meskipun hal itu dapat berakibat fatal. Tapi dibalik kekhawatiran, sesungguhnya masih terselip sebuah harapan. Bayangkan apabila dunia politik tanpa representasi sama sekali atas sosok seorang ulama/kiayi politisi. Sebab sebagian umat sesungguhnya juga mengharapkan keharusan sosok ulama/kiayi politisi yang handal, yang mampu mewarnai dunia politik

¹⁰Wawancara Dr. Azyumardi Azra, *Ulama Dalam Posisi Delematis*, “dalam tempo interaktif” 1 Maret 1997.

dengan akhlakul karimah, agar politik tidak lagi dicampuri oleh hal-hal yang dapat merusak tatanan demokrasi, ulama/kiayi politisi yang teguh dan tegas dalam memperjuangkan aspirasi umat.

Apabila seluruh ulama/kiayi (sebagian besar) berduyun-duyun masuk ke dalam kancah politik, maka hal inipun rasanya kurang baik, mengingat umat sedang menunggu “*sentuhan*” rohani pak ulama/kiayi di tengah kehidupan yang serba modern, kehidupan yang hampa, yang jauh dari nilai-nilai spiritual. Kiai adalah figur yang selalu dihormati kapan dan dimanapun keberadaannya. Tak bisa dipungkiri jika kehadirannya di anggap berkah tersendiri bagi masyarakat sekitar. Kiai merupakan pewaris para Nabi sebagai penuntun jalan bagi kehidupan pada masa sekarang ini, di mana kebaikan merupakan hal asing atas menjamurnya nilai-nilai kejelekan. Sehingga peran dan gerakan politik kiai, sampai saat ini mampu mewarnai perjalanan demokrasi di Indonesia. Bahkan yang ikut memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia ini, tidak terlepas dari peranan para kiai.

Entah karena memang sudah demokrasi yang telah ternodai atau status kiai terkotori oleh segelintir yang disebut kiai palsu yaitu ketidaksesuaian antara perkataan, perbuatan dan ketetapan dalam melaksanakannya, menjadikan yang disebut politik kiai merupakan hal yang kotor. Padahal manusia dan kiai merupakan bagian dari masyarakat, tidak akan pernah terlepas dari yang namanya politik. Dan sejak lahirpun kita telah diperkenalkan oleh politik, entah kita sadari atau tidak.

Pesantren dan masyarakat, adalah lingkungan di mana seorang kiai merupakan pegangan sebagaimana rakyat jelata menyerahkan segala keputusan hidupnya pada sang raja. Tapi kiai, ia orang yang berilmu dan beribadah di mana setiap perilakunya menyatu antara perkataan, perbuatan dan peraturan yang tertulis atau tidak.

Penutup

1. Apa yang penulis paparkan di atas jika ditarik benang merahnya maka akan dapat ditemukan dua pendapat yang saling kontroversi sekitar peran politik seorang ulama/kiayi. *Pertama*, Mereka yang pro mendukung keterlibatan ulama dalam arena politik dan memandang bahwa keterlibatan itu merupakan keharusan dan kemestian yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dilandasi bahwa Islam adalah ajaran yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek politik di dalamnya. *Kedua*, Memandang keterlibatan ulama dalam aspek politik dipandang sebagai sesuatu yang akan menjatuhkan citra dan kharisma ulama sebagai *waratsah al-anbiya'* (pewaris para Nabi). Pandangan didasarkan pada realitas empiris bahwa di mana politik memiliki kesan (*image*) negatif. Pendukung yang kedua ini, memandang bahwa ulama/kiayi tidak layak untuk terjun ke dunia politik.
2. Demokrasi pasca reformasi masih banyak menyisahkan persoalan sebagai indikator, pelaksanaan pemilu masih banyak terjadi penyelewengan seperti serangan fajar, politik uang, politik dagang sapidan semacamnya demikian juga Pemilukada selain politik uang, penyelewengan kandidat yang terpilih melakukan tindak korupsi.
3. Sementara parpol-parpol masih pada tataran pencitraan dari pada pendidikan politik. Oleh karenanya pendidikan politik sangat dipentingkan demikian juga rekrutmen yang harus selektif, objektif dan memiliki akuntabilitas serta wawasan yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Muhammad, 1993. *Akhlaq al-Ulama*. (terj. A. Mujab Mahali), Solo: Ramadhani.
- Adang, Bahran, *Parpol Islam dan Konstalasi Politik Pasca Pemilu*. Harian Pelita.
- Ahmad, Mumtaz, 1993. *Teori Politik Islam, Kesarjanaan Masa Kini dan Prospek-Prospek Masa Depan*. Bandung: Mizan.
- Al-Qalam Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, No. 85/XV/2000.
- Azra, Azyumardi, 1997. *Ulama Dalam Posisi Delematis, "dalam tempo interaktif"* (Wawancara 1 Maret 1997).
- Efendi, Bahtiar, 1999. *Fenomena Partai Islam*, dalam Hamid Basyait dan Hamid Abidin, ed., *Mengapa Partai Islam Kalah: Perjalanan Politik Islam dari Pra Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*. Jakarta: Alvabet.
- Ma'shum, Syaefullah, 1998. *Karisma Ulama, Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*. Bandung: Kerjasama Yayasan Syaifuddin Zuhri dengan Penerbit Mizan.
- Mawardi, Imam, 2002. *Wahai Ulama Kembalilah Kepada Ummat*. Surabaya: Putra Pelajar.
- Shihab, Quraish, 1996. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.